



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Sekretaris Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Prasetya
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2016

Pihak Pertama

Puji Winarni

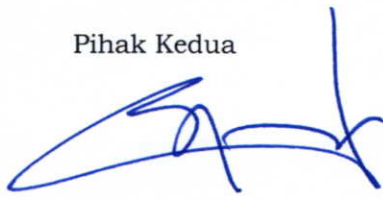
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SEKRETARIS UTAMA
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Customer Perspectives			
1 Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas	1 Nilai kepatuhan layanan publik	70	Nilai
2 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	2 Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN	70 (BB)	Nilai
	3 Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP	Opini
	4 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75	Nilai
	5 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Settama	3,6	Nilai
	6 Zona Integritas WBK/WBBM	2	Predikat WBK
Internal Process Perspectives			
3 Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel	7 Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif	80	%
	8 Realisasi pelaksanaan anggaran BSN	≥95	%
4 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN	9 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN	100	%
	10 Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas Lab. Acuan	40	%
5 Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang SPK	11 Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK	2, 2	PP, Rperpres
	12 Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100	%
6 Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten	13 Persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	100	%
7 Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN	14 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Learning and Growth Perspectives			
8 Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang profesional	15 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Settama yang meningkat kompetensinya	100	%
	16 Realisasi anggaran Settama	≥95	%
	17 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola Settama	12	Aplikasi

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	9,613,110,000
2 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,699,136,000
3 Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN	67,392,278,000
4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN	106,500,000,000
5 Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN	106,500,000,000
Jumlah	294,704,524,000

Pihak Kedua



Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama



Puji Winarni



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Beni Nugraha
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Maret 2016

Pihak Pertama

M. Beni Nugraha